



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO: 3100/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**Pembinaan Anak Jalanan Pada Masa Pandemic Covid-19 Melalui
Manajemen Kasus yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis
Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial dan
Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung**

Skripsi

Oleh

Dian Noviani

2016310099

Bandung

2021



Universitas Katolik Parahyangan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO: 3100/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**Pembinaan Anak Jalanan Pada Masa Pandemic Covid-19 Melalui
Manajemen Kasus yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis
Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial dan
Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung**

Skripsi

Oleh

Dian Noviani

2016310099

Pembimbing

Dr. Indraswari

Bandung

2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Administrasi Publik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Dian Noviani
Nomor Pokok : 2016310099
Judul : Pembinaan Anak Jalanan Pada Masa Pandemi Covid-19 Melalui Manajemen Kasus yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Selasa, 19 Januari 2021
Dan dinyatakan **LULUS**

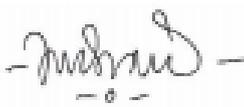
Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota
Susana Ani Berliyanti, Dra., M.Si.

: 

Sekretaris

Indraswari, M.A., Ph.D.

: 

Anggota

Pius Suratman Kartasmita, Drs., M.Si., Ph.D.

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik



Tanda Persetujuan Skripsi

Nama : Dian Noviani
Nomor Pokok : 2016310099
Judul : Pembinaan Anak Jalanan Pada Masa Pandemic Covid-19 Melalui Manajemen Kasus yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung

Menyetujui untuk diajukan pada

Ujian sidang jenjang sarjana

Bandung 06 Januari 2021

Pembimbing

Dr. Indraswari

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Trisno Sakti Herwanto, S.IP.,MPA.

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dian Noviani
NPM : 2016310099
Jurusan/Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul : Pembinaan Anak Jalanan Pada Masa Pandemic Covid-19 Melalui Manajemen Kasus yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung

Pernyataan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apa pun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.



Bandung, 06 Januari 2021

Dian Noviani

HASIL UJI PLAGIARISME

Dian Noviani_Skripsi Ganjil 2020/2021

ORIGINALITY REPORT

26%	24%	4%	13%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	dinsosnangkis.bandung.go.id Internet Source	6%
2	mail.kemsos.go.id Internet Source	2%
3	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	2%
4	ppid.bandung.go.id Internet Source	2%
5	Submitted to Catholic University of Parahyangan Student Paper	1%
6	www.scribd.com Internet Source	1%
7	repository.unpas.ac.id Internet Source	1%
8	pt.scribd.com Internet Source	<1%
9	id.123dok.com	



Bandung, 6 Januari 2021

Dian Noviani

ABSTRAK

Nama : Dian Noviani
NPM : 2016310099
Judul : **Pembinaan Anak Jalanan Pada Masa Pandemic Covid-19 Melalui Manajemen Kasus yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung**

Penelitian ini berjudul “Pembinaan Anak Jalanan Pada Masa Pandemic Covid-19 Melalui Manajemen Kasus yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung”. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi manajemen pelayanan publik terkait dengan pembinaan anak jalanan pada masa pandemic covid-19 untuk menurunkan jumlah anak yang berkegiatan di jalanan dan meningkatkan kesejahteraan anak jalanan.

Peneliti melakukan analisis menggunakan teori Manajemen Kasus melalui tujuh tahap, yaitu: identifikasi klien, asesmen, rencana intervensi, koordinasi, dukungan, pencatatan, dan monitoring dan evaluasi. Tipe penelitian adalah Metode Penelitian Kualitatif (Deskriptif), melalui proses wawancara dengan ketua Unit Pelaksana Teknis dan Kepala bidang perlindungan pemberdayaan sosial PMKS Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung, pekerja sosial UPT serta kelompok manajemen kasus (satpol PP, pengurus SOS Children Village, Save The Children, pembina Rumah Perlindungan Sementara Anak dan anak jalanan). Peneliti juga melakukan proses observasi untuk melihat proses dan hasil pemberian pembinaan melalui kerjasama dengan beberapa pihak.

Berdasarkan hasil penelitian, program pembinaan anak jalanan (PMKS) belum mencapai hasil yang maksimal dan efektif sesuai dengan tujuan utamanya yaitu anak tidak kembali berkegiatan di jalanan. Melalui hasil penelitian, dapat dibuktikan dengan beberapa tahapan yaitu: 1) Proses penjangkauan anak jalanan kurang tepat berdasarkan identifikasi; 2) Hasil asesmen kurang diperdalam dan kurang tepat sasaran; 3) Dalam rencana intervensi terdapat beberapa indikator yang kurang tercapai; 4) Koordinasi dengan pihak rujukan kurang spesifik; 5) Dukungan yang diberikan sudah tepat tetapi kurang efektif; 6) Minimnya hasil pencatatan yang ditindaklanjuti oleh pihak rujukan; 7) Kurangnya proses monitoring dan evaluasi kepada anak jalanan dan pihak rujukan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti juga memiliki beberapa saran yang dapat meningkatkan pelayanan kepada klien (anak jalanan).

Kata Kunci: Pembinaan, Anak Jalanan, Pelayanan Publik, Manajemen Kasus

ABSTRACT

Name : Dian Noviani

NPM : 2016310099

Title : Development of Street Children During Covid-19 Pandemic Through the Case Management carried out by the Technical Implementing Unit for the Bandung City Social Welfare and Poverty Alleviation Service Center

The title of this research is "Development of Street Children During Covid-19 Pandemic Through the Case Management carried out by the Technical Implementing Unit for the Bandung City Social Welfare and Poverty Alleviation Service Center ". This research aims to analyze and evaluate the public service management relating to the management of the street children during covid-19 pandemic to reduce the number of children carrying out activities on the streets and improve the welfare of the street children.

The researcher carried out the analysis by utilizing the Case Management theory with seven steps, namely: client identification, assessment, intervention plan, coordination, recording, and monitoring and evaluation. The research type is Quality Research Method (Descriptive), through an interview with the Technical Implementing Unit chief and the Head of the social empowerment and protection for the people with social welfare problems (PMKS) of the Bandung City Social and Poverty Alleviation Board, social workers for the Social Rehabilitation Unit (UPT) as well as group of case management (Civil Service Police Unit of Indonesia, board of the SOS Children Village, Save The Children, administrator of the Temporary Protection Shelter for Children and street children). This research also conducted the observation process to apprehend the process and result of the provision of the management through cooperation of several parties.

Based on the research outcome, the street children management program (PMKS) has not reached the maximum and effective outcomes in accordance with the main purpose namely for the children to not return to the streets. Based on this research, it could be proven through several stages: 1) The outreach process was less appropriate upon identification; 2) The assessment result was not further assessed and not well-targeted; 3) In the intervention plan, there were several indicators that were not achieved; 4) Coordination with the referrals was not specific; 5) The support provided was appropriate but less effective; 6) Lack of recording results that were followed up by the referral parties; 7) Lack of monitoring process and evaluation towards the street children and referral parties. Based on the research outcome, the researcher also has several suggestions that could improve the services provided to the clients (street children).

Keywords: Development, Street Children, Public Service, Case Management

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Karya tulis ilmiah yang berjudul **“Pembinaan Anak Jalanan Pada Masa Pandemic Covid-19 Melalui Manajemen Kasus yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung.”** dalam rangka untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak sulit untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Terdapat beberapa keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala ucapan syukur dan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Dr. Pius Sugeng Prasetyo selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan.
2. Dr. Indraswari, selaku Dosen Pembimbing yang bersedia dan telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan bimbingan serta dukungan kepada penulis dalam rangka menyelesaikan penulisan skripsi.
3. Bapak Trisno Sakti Herwanto, S.IP., MPA., selaku Ketua Program Studi Sarjana Administrasi Publik dan Dosen Wali yang telah banyak memberikan bimbingan dan semangat kepada penulis untuk menjalankan serta mengejar mata kuliah di Administrasi Publik dengan sungguh-sungguh.

4. Seluruh pengajar Fakultas FISIP Universitas Katolik Parahyangan, khususnya pihak pengajar Program Studi Administrasi Publik atas segala ilmu pengetahuan dan pendidikannya sehingga membuat penulis mengerti dan menjadi pelajar yang lebih baik.
5. Kedua Orang Tua penulis yang telah banyak memberikan doa, dukungan dan semangat untuk menyelesaikan penulisan skripsi.
6. Kakak penulis, yaitu Indah Purnama Setiawan Putri dan Rizky Ridhaka yang bersedia meluangkan waktu dan pikiran untuk membantu penulis dalam proses penulisan skripsi.
7. Kepada para informan dari UPT Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung
8. Para informan dari NGO yaitu Save The Children dan SOS Children Village
9. Para informan dari Rumah Perlindungan Sementara Anak Kota Bandung
10. Para informan dari pihak Satpol PP yang telah memberikan waktunya untuk melakukan wawancara
11. Klien (anak jalanan) di Puskesmas dan Rumah Perlindungan Sementara Anak sebagai informan
12. Sahabat dan teman dekat penulis yaitu vanessa, ribka, tasha, devina, devani, kharis, dicky, ari, noel, aca, febiola, valen, glendy, ka norma, hans, bang rifan, ashilla, diana, dewi wulandari yang telah memberikan bantuan ilmu pengetahuan, masukan, kegembiraan dan dukungan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi.

13. Teni Tri Haykal, yang telah menjadi teman diskusi dan membantu memberikan masukan, semangat serta doa kepada penulis dalam proses penyelesaian penulisan skripsi.
14. Sesama bimbingan bu indras yaitu, esther, cindy, yustika, zaki, sou dan monica yang telah memberi masukan dan dukungan kepada penulis dalam proses penyelesaian penulisan skripsi.
15. Anggota Mahitara yang telah memberikan pengalaman dan masukan untuk menjadikan pribadi penulis menjadi lebih baik serta semangat untuk menyelesaikan penulisan skripsi.
16. Teman seangkatan dan seperjuangan Administrasi Publik 2016 dan FISIP 2016 yang telah membantu memberikan ilmu pengetahuan dan masukan kepada penulis selama proses penyelesaian penulisan skripsi.

Semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang baik dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penelitian dan penyusunan penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima segala kritik dan masukan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Penulis berharap semoga karya tulis ilmiah ini akan memberikan manfaat, informasi dan pengembangan ilmu pengetahuan kepada para pembaca.

Bandung, Januari 2021

Dian Noviani

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Penelitian.....	19
1.3 Identifikasi Masalah.....	19
1.4 Tujuan Penelitian.....	21
1.5 Kegunaan Penelitian.....	21
BAB II.....	22
KERANGKA TEORI	22
2.1 Collaborative Governance	22
2.2 Pengertian Ilmu Administrasi Publik	24
2.3 Pelayanan Publik	30
2.4 Anak Jalanan	35
2.4.1 Faktor Penyebab Keberadaan Anak Jalanan	37
2.4.2 Pembinaan Anak Jalanan	39
2.5 Manajemen Kasus	42
2.5.1 Tujuan Manajemen Kasus.....	44
2.5.2 Fungsi Manajemen Kasus	45
2.5.3 Pekerja Sosial Dalam Manajemen Kasus	49
2.6 Model Penelitian	52
2.7 Operasional Variabel	54
BAB III.....	63
METODE PENELITIAN.....	63
3.1 Jenis Penelitian.....	63

3.2 Peran Peneliti	65
3.3 Lokasi Penelitian.....	66
3.4 Sumber data.....	66
3.4.1 Sumber Primer	66
3.4.2 Sumber Sekunder	67
3.5 Teknik Pengumpulan Data	68
3.5.1 Wawancara	68
3.5.2 Observasi	70
3.5.3 Studi Dokumen.....	71
3.6 Analisis Data.....	71
3.7 Metode Validitas Data	73
BAB IV	74
PROFIL DINAS SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA BANDUNG DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL (PUSKESOS) DINAS SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA BANDUNG	74
4.1 Profil Dinas Sosial Kota dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung	74
4.1.1 Visi dan Misi	74
4.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi	75
4.1.3 Sumber Dana Anggaran	95
4.1.4 Perencanaan Strategis Program dan Bentuk Kegiatan	95
4.1.5 Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung	96
4.2 Profil UPT (Unit Pelaksana Teknis) Pusat Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung.....	98
4.2.1 Visi dan Misi	98
4.2.2 Sasaran Pelayanan.....	99
4.2.3 Dasar Hukum.....	101
4.2.4 Sumber Dana Anggaran	103
4.2.5 Bagan Struktur Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung.....	103
4.2.6 Bagan Prosedur Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung	104
4.2.7 Bagan Tahapan Pelaksanaan Penanganan PMKS Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung	105

4.2.8 Manajemen Layanan UPT Puskesmas Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung.....	106
BAB V	122
ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	122
5.1 Tahap I (identifikasi klien dan penjangkauan klien)	122
5.2 Tahap II (asesmen klien)	134
5.3 Tahap III (rencana intervensi)	146
5.3.1 Mekanisme Rencana Pelayanan Intervensi	153
5.4 Tahap IV (koordinasi).....	158
5.5 Tahap V (Dukungan)	167
5.6 Tahap VI (pencatatan)	172
5.7 Tahap VII (monitoring dan evaluasi)	181
BAB VI	191
KESIMPULAN DAN SARAN.....	191
6.1 Kesimpulan	191
6.2 Saran.....	198
DAFTAR PUSTAKA	202
LAMPIRAN.....	206

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Jumlah Anak Jalanan Sebagai Pengemis di Kota Bandung Tahun 2014-2020	8
Tabel 4.1 Sarana dan Fasilitas Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung.....	117

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Penelitian Manajemen Kasus	51
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan kota Bandung	97
Gambar 4.2 Bagan Struktur Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung	103
Gambar 4.3 Prosedur Layanan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung	104
Gambar 4.4 Bagan Tahapan Pelaksanaan Penanganan PMKS Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung	105
Gambar 5.1 Rekap Klien Menurut Sumber Rujukan (Penjangkauan Klien)...	129
Gambar 5.2 Grafik Rekap Klien Menurut Lokasi Penjangkauan Tahun 2020	130
Gambar 5.3 Grafik Klien Menurut Sumber Rujukan	131
Gambar 5.4 Standar Operasional Prosedur Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung	152
Gambar 5.5 Perkembangan Pelaksanaan Penanganan PMKS Per bulan Desember 2020	178
Gambar 5.6 Kegiatan Anak Jalanan di Rumah Perlindungan Sementara Anak Kota Bandung	185

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai negara berkembang, permasalahan yang terjadi di negara Indonesia masih sangat beragam, dari permasalahan umum seperti kemiskinan, pendidikan, korupsi, pelanggaran HAM, dan permasalahan khusus lainnya. Salah satunya terkait dengan permasalahan anak jalanan yang tidak memiliki keluarga, tempat tinggal, tidak dapat melanjutkan pendidikan, dan tidak memiliki biaya untuk bertahan hidup. Anak jalanan rentan terhadap masalah kriminalitas, penyakit, dan seksualitas berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti. Jalanan merupakan salah satu tempat yang dijadikan untuk ruang beraktivitas, seperti di rel kereta, perempatan lampu lalu lintas, tempat wisata, tempat makan dan taman kota. Kerentanan tersebut menjadi perhatian sebuah lembaga salah satunya Dinas Sosial.

“Although there is no unanimity on this definition, street children are part of the population often considered as the most vulnerable in the world (Bony, 2016).”¹

Bony mendefinisikan bahwa anak jalanan merupakan bagian dari populasi yang sering dianggap rentan di seluruh dunia.

Pengertian anak jalanan menurut UNICEF adalah anak yang masih berumur di bawah 16 tahun yang telah melepaskan diri dari orang terdekat dimulai dari

¹ J.M Cenat. Child Abuse & Neglect, 2018. Diakses dari <file:///C:/Users/hp/Downloads/j.chiabu.2018.01.024.pdf> (28/09/20) pukul 16.48

keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat yang memiliki kehidupan nomaden (berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya) di jalan raya.

Pengertian anak jalanan menurut Permensos adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari. Kriteria : menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan maupun di tempat-tempat umum; atau mencari nafkah dan/atau berkeliaran di jalanan maupun di tempat-tempat umum². Permensos merupakan Peraturan Pemerintah yang digunakan oleh Dinas Sosial sebagai panduan menjalankan program.

Indonesia membutuhkan suatu komponen untuk menjadikan negara menjadi negara maju, salah satunya kemajuan dan peningkatan hak asasi anak untuk mendapatkan hak hidup yang layak. Menurut data UNICEF Indonesia secara keseluruhan sepertiga penduduk Indonesia merupakan anak-anak, sekitar 85 juta dan angka tersebut adalah jumlah terbesar keempat di dunia. Perlunya perlindungan terhadap hak anak-anak di Indonesia juga agar mereka mendapatkan kehidupan yang layak dan mendapat pendidikan hingga usia yang telah ditentukan, dengan demikian maka anak-anak yang akan terus mempertahankan pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang agar Indonesia bisa menjadi negara maju. Lingkungan yang buruk akan membawa dampak negatif bagi semua orang khususnya anak-anak

² Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial. Diakses dari <http://www.bphn.go.id/data/documents/12pmsos008.pdf> (04/10/20) pukul 14.28

yang berkehidupan di jalanan dan memiliki kondisi mental yang belum stabil. Seorang anak memiliki hak dan tugas untuk sekolah dan bermain. Usia dalam kategori anak merupakan seseorang yang belum dapat menggunakan nalarnya secara baik dan utuh. Hal ini dapat menjadikan anak tersebut mudah terpengaruh oleh lingkungan yang buruk dengan teman sebaya lainnya.

Keberadaan anak jalanan merupakan bukti bahwa hak perlindungan seorang anak belum secara menyeluruh didapatkan serta masih ada kesenjangan sosial. Anak merupakan salah satu subjek yang harus dilindungi dan diperhatikan sebagai kualitas yang dapat memajukan kehidupan negara. Pada dasarnya aktivitas yang dijalankan untuk mempertahankan hidupnya antara lain bekerja di sektor informal seperti berjualan, menjadi pengemis, memulung sampah dan barang bekas, menjadi pengamen, menyemir sepatu dan kegiatan lainnya. Permasalahan umum yang menyebabkan populasi anak jalanan meningkat yaitu faktor keluarga, ekonomi, pendidikan dan lingkungan.

Dengan pertumbuhan kota yang terjadi, semakin bermunculan juga anak jalanan. Fungsi sosial seorang PMKS (anak jalanan) tidak berjalan dengan baik dan benar. Masa depan yang mereka miliki akan terancam jika hal ini terus terjadi, belum banyak perhatian khusus terhadap anak jalanan yang tidak memiliki sumber pendapatan dan pendidikan yang terjamin. Nasib seorang anak merupakan tanggungjawab keluarga, lingkungan masyarakat dan pemerintah serta lembaga lainnya untuk menjamin kebutuhannya hingga mendapatkan hidup yang layak. Kesehatan mental, fisik dan pola pikir seorang anak akan menurun jika terus hidup

di lingkungan yang tidak baik. Anak jalanan yang tidak memiliki tempat tinggal atau tempat untuk berteduh rentan mendapatkan penyakit.

Pernyataan UNICEF (1986) yang dikutip oleh Lusk dalam *Journal of Sociology & Social Welfare* (1989:59) anak jalanan dibagi menjadi 3 kategori, yang pertama adalah anak yang mempunyai resiko tinggi (*children at high risk*), kedua adalah anak yang bekerja di jalan (*children on the street*) dan ketiga adalah anak yang hidup di jalan (*children of the street*).

Kondisi dan keberadaan mereka bukan sesuatu hal yang menyenangkan, hidup keras yang dijalani membuat psikis dan fisik menjadi lemah sehingga kualitas anak menjadi menurun. Fakta seperti ini bukan lagi rahasia melainkan sudah menjadi permasalahan setiap tahun di Indonesia. Berbeda dengan kondisi anak yang mendapat kehidupan layak dan memiliki keluarga untuk memberikan pengaruh positif di dalam kehidupan. Sangat memprihatinkan melihat seorang anak tidak memiliki perlindungan khusus dari keluarga, tidak mendapatkan kebutuhan secara jasmani maupun rohani, berkeliaran di jalanan dengan lingkungan yang tidak baik dan terancam tidak memiliki masa depan.

Hingga tahun 2019, data yang diperoleh dari Kementerian Sosial, masih terdapat 12.000 anak Indonesia termasuk kategori anak jalanan dan menyebutkan bahwa ada lima provinsi dengan jumlah anak jalanan tertinggi salah satunya di Jawa Barat.³ Di sisi lain terdapat permasalahan kompleks terkait dengan permasalahan sosial terkait anak jalanan yang membuat lingkungan menjadi tidak teratur.

³ Web resmi Kemensos. <https://www.kemsos.go.id/>. (20/02/20). Pukul 16.34

Permasalahan ekonomi, keluarga, lingkungan yang buruk dan putus sekolah menjadi beberapa penyebab utama dari keberadaan anak jalanan. Anak-anak ini seharusnya mendapatkan pelayanan yang lebih sebagai bentuk kepedulian terhadap keberlangsungan hidupnya. Dimulai dari keluarga yang tidak membiarkan anaknya terlantar di jalanan dan memilih untuk putus sekolah. . Dengan adanya fakta-fakta tersebut, terlihat adanya ketidaksesuaian dengan Undang-Undang Dasar pasal 34 ayat 1, bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”.⁴

Harus disadari bahwa terhambatnya pemenuhan kebutuhan hak seorang anak merupakan epiphenomenon yang berdiri peristiwa sosiopolitik yang kompleks, kondisi kehidupan yang merugikan, serta berbagai trauma yang bermunculan. Permasalahan ekonomi yang menjadi faktor terbesar dengan adanya kasus ini, kebutuhan harus dilengkapi dari yang paling mendasar yaitu dalam hal konsumsi sehari-hari. Permasalahan keluarga di tempat tinggal mereka merupakan penyebab utama munculnya anak jalanan di kota-kota besar berdasarkan observasi peneliti yang didapatkan dari Dinas Sosial Kota Bandung.

Negara Indonesia sedang berhadapan dengan virus covid-19 yang mengancam kesehatan masyarakat. Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkan ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok pada tahun 2019⁵. Sebagian besar sekitar 80% orang yang terinfeksi berhasil pulih

⁴ Web resmi DPR RI. <http://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>. (20/02/20). Pukul 17.01

⁵ Web resmi World Health Organization. Diakses dari <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/ga-for-public> (04/10/20) pukul 14.42

tanpa harus melakukan perawatan khusus. Lansia dan orang-orang yang memiliki kondisi medis seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung dan paru-paru, diabetes atau kanker memiliki kemungkinan lebih besar mengalami sakit yang lebih serius.

Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak dan remaja memiliki resiko terinfeksi dan menularkan ke orang lain lebih cepat. Maka dari itu WHO mengeluarkan kebijakan yang menganjurkan masyarakat menjaga kebersihan dengan sering mencuci tangan, rajin menggunakan masker, menghindari kerumunan, berjaga jarak setidaknya 1 meter, tetap tinggal di rumah dan melakukan isolasi mandiri untuk menjaga kondisi sekitar agar penyebaran virus dapat diminimalisir.

Anak jalanan memiliki pola pikir bahwa hidup di jalan merupakan kehidupan normatif dan sudah sesuai dengan hukum norma yang berlaku. Fenomena pandemic covid-19 merupakan masalah baru yang mewajibkan masyarakat mematuhi protokol kesehatan. Anak jalanan tidak banyak yang mengikuti kewajiban dan lebih memilih untuk hidup tanpa aturan. Menurut anak jalanan tersebut situasi sebelum adanya pandemic dan setelah adanya pandemic tidak ada perbedaan signifikan pada dirinya. Mereka termasuk kategori rentan dan beresiko tinggi karena hampir setiap hari berada di jalan dan bertemu banyak orang di kerumunan. Sikap tidak peduli dan acuh terhadap protokol kesehatan membuat kondisi anak jalanan tersebut semakin rentan dalam masalah kesehatan. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa pada masa pandemic covid-19 ini, panti sosial yang mengurus anak-anak tutup sementara dan tidak menerima anak baru dari luar. Hal tersebut

menyebabkan anak jalanan yang telah dibina dan tidak memiliki orangtua kesulitan untuk mencari tempat tinggal.

Kemajuan infrastruktur di Kota Bandung tidak seimbang dengan kesejahteraan sosial di dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya keberadaan anak jalanan dapat mengganggu kebersihan, ketertiban dan keamanan. Permasalahan sosial seperti ini sudah terjadi dari sekian tahun lamanya, dan belum secara efektif tuntas menyeluruh. Perlindungan terhadap mereka tidak hanya sekedar menghilangkan anak-anak dari jalanan tetapi juga harus dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Karena mereka adalah salah satu kelompok rentan, maka harus dapat dijauhkan dari situasi yang mengacu pada eksploitasi dan kekerasan yang membahayakan.

Pada masa pandemic covid-19, pihak satpol PP masih melakukan penjangkauan dan penjaringan anak jalanan untuk dibawa ke kantor Dinas Sosial Kota Bandung. Berdasarkan pernyataan pihak satpol PP, pada masa pandemic covid-19 tidak mengurangi jumlah anak di jalanan. Semakin meningkat anak jalanan yang ditemukan sedang berkegiatan di tempat umum. Tidak ada anak jalanan yang bebas dari penyakit. Dalam situasi seperti ini, pekerja sosial dan pihak yang bertanggung jawab melakukan pembinaan kepada anak jalanan lebih memperketat cara penanganan kepada klien. Kegiatan tersebut dilakukan mengingat anak jalanan sangat rentan terhadap penyakit dan berbagai pihak harus melakukan penyesuaian secara tepat. Tetapi pandemic covid-19 saat ini menghambat pergerakan tenaga kerja dan pekerja sosial untuk melakukan pelayanan kepada anak jalanan (PMKS).

Tabel 1.1
Data Jumlah Anak Jalanan di Kota Bandung
Tahun 2014-2020

No	Tahun	Jumlah
1	2014	1.607 Anak
2	2015	1.520 Anak
3	2016	1.775 Anak
4	2017	1.654 Anak
5	2018	1.806 Anak
6	2019	1.846 Anak
7	2020	1.932 Anak

Sumber : Data UPT Puskesos Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung

Sepanjang tahun 2019 Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung menemukan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dalam permasalahan anak jalanan sejumlah 1.846 anak dari berbagai sudut kota. Dilihat dari data yang tertera di atas, pada tahun 2018 angka tersebut terjadi penurunan dan mengalami kenaikan pada tahun 2019. Menurut kepala UPT Dinas Sosial, banyaknya jumlah anak jalanan yang tersebar di sudut kota berasal dari luar daerah. Mereka datang untuk mencari pekerjaan dikarenakan banyaknya tempat wisata dan tempat makan yang didatangi oleh wisatawan, kendala tersebut dapat menyebabkan bertambahnya jumlah anak jalanan.

Kepala UPT Dinas Sosial Kota Bandung menyatakan bahwa data terkait anak jalanan di kota Bandung tidak dapat dikonfirmasi secara akurat dan akurasinya

akan selalu berubah. Hal tersebut karena faktor situasi anak jalanan yang selalu berubah berdasarkan kriteria anak jalanan. Fenomena covid-19 ini tidak merubah perilaku anak untuk tetap berkegiatan di jalan.

Adanya isu yang menyebar di media terkait dengan jumlah kenaikan anak jalanan di kota Bandung, setelah di presentase kan menjadi 80 persen.⁶ Ditemukannya anak jalanan sebagai pengemis maupun pemulung telah menempati sudut kota seperti di alun-alun dan stasiun Bandung. Hal tersebut perlu menjadi catatan karena dengan bertambahnya jumlah populasi anak yang menyebar di jalanan akan menghambat kota Bandung sebagai Kota Layak Anak. Tidak hanya berdampak negatif bagi anak tersebut tetapi akan berdampak pada lingkungan sekitar.

Gubernur Jawa Barat menyatakan bahwa sering menemukan anak jalanan yang melakukan tindakan negatif seperti mengkonsumsi minuman keras dan lainnya. Pada bulan Juli tahun 2019, setelah anak tersebut diajak berdiskusi sebagian besar mereka turun ke jalan dikarenakan tidak melanjutkan sekolah.

Kasus anak yang berkegiatan di jalanan sebagai pengemis banyak ditemukan khususnya di daerah Bandung Timur (Antapani, Kosambi, Buah Batu, Ciwastra, Cicaheum dan Gatot Subroto). Indikasi masalah terkait dengan anak jalanan dapat disebutkan antara lain:

⁶ Anif Arifani. Aplikasi Regulasi Pembinaan Anak Jalanan oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung. <file:///C:/Users/my%20hp/Downloads/3782-9856-1-SM.pdf>. (22/02/20) pukul 21.15

1. Adanya indikasi bahwa jumlah anak jalanan setiap harinya yang dibawa oleh satpol PP ke dinas sosial Kota Bandung berjumlah 30 anak, dan jumlah tersebut telah melampaui kuota di rumah singgah pada masa pandemic covid-19.
2. Gubernur Jawa Barat sering menemukan anak jalanan sedang melakukan kegiatan negatif pada malam hari, sebagai contoh; mengkonsumsi minuman keras dan barang yang disalahgunakan pemakaiannya. Hal tersebut juga mengganggu ketertiban umum di ruang publik Kota Bandung.
3. Adanya indikasi bahwa jumlah anak jalanan yang putus sekolah meningkat, mereka rata-rata memilih untuk membantu orang tua mencari nafkah di jalan sebagai salah satu cara termudah dalam mendapatkan uang.
4. Adanya indikasi bahwa anak-anak yang memilih untuk kembali berkegiatan di jalan setelah mendapat pembinaan oleh Dinas Sosial Kota Bandung dan keluar dari balai maupun panti.
5. Adanya indikasi bahwa pada masa pandemic covid-19 anak jalanan semakin rentan terhadap penyakit
6. Adanya indikasi bahwa pada masa pandemic covid-19 banyak balai maupun panti yang tutup sementara
7. Adanya indikasi bahwa anak jalanan tidak memiliki keterampilan khusus dan menyelesaikan pendidikannya hingga batas usia yang telah ditentukan
8. Adanya indikasi bahwa jumlah Sumber Daya Manusia khususnya pekerja sosial pada masa pandemic covid-19 di UPT Dinas Sosial Kota Bandung dengan lembaga rujukan kurang dalam memberikan pembinaan

Dengan adanya indikasi permasalahan tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk lebih mensejahterakan kehidupan anak jalanan. Perubahan perilaku dan pola pikir seorang anak agar memiliki wawasan yang luas serta dapat membedakan antara kegiatan yang positif dan negatif untuk masa depannya. Selain itu, penelitian terhadap anak jalanan penting dilakukan agar jumlah anak jalanan tidak terus meningkat sehingga anak-anak mendapatkan haknya untuk melanjutkan pendidikan dan dapat kembali ke keluarganya. Anak jalanan ini harus mendapat pembinaan dari pihak-pihak tertentu. Pandemi covid-19 hingga tahun 2020 ini belum mereda dan jumlah orang yang terpapar virus terus meningkat. Virus tersebut tidak dapat diprediksi kapan akan berakhir, sehingga kerentanan penyakit pada anak jalanan semakin tinggi. Dengan diterapkan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), pemerintah Jawa Barat menyatakan bahwa naiknya angka penderita covid-19 pada anak. Kurangnya sosialisasi dan pengawasan terhadap orangtua dan anak sehingga pemahaman pentingnya untuk menjaga kebersihan diabaikan. Sosialisasi dan penertiban terhadap anak jalanan seolah luput dari perhatian pemerintah setempat.

Kasus anak jalanan dapat diminimalisir dengan bantuan peranan keluarga yang pada umumnya menjadi faktor utama munculnya keberadaan anak di jalanan. Peran orang tua dalam membina dan melindungi anaknya sangat dibutuhkan untuk kondisi psikis seorang anak. Kedekatan yang terbina seharusnya menjadikan anak memiliki rasa nyaman dan aman untuk menetap di rumah tinggalnya bersama orangtuanya. Selain itu diberikan dukungan agar anak memiliki keinginan untuk melanjutkan sekolah dengan dukungan biaya yang diberikan dari pihak Dinas Pendidikan. Pihak keluarga yang tidak memiliki sumber biaya untuk memenuhi

kebutuhannya paling tidak memberikan dukungan moral kepada seorang anak. Selain itu diperlukannya peran dari masyarakat agar lebih memperhatikan keberadaan dan kondisi anak jalanan yang memilih untuk menjadi pengemis. Masyarakat yang terdiri dari perseorangan, kelompok dan organisasi kemasyarakatan. Perlindungan dan pembinaan juga melibatkan masyarakat untuk ikut serta dalam mewujudkan kesejahteraan sosial seorang anak jalanan. Pemahaman masyarakat yang rendah terhadap kondisi dan keberadaan anak jalanan di sudut kota juga akan menyebabkan kuantitas anak jalanan semakin meningkat.

Pihak lainnya dari sisi pemerintah daerah yang ikut bertanggung jawab melindungi dan memastikan bahwa program yang diselenggarakan mencapai tujuannya. Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁷ Anak merupakan aset sebuah negara, masa depan mereka harus terpenuhi dan terjamin sesuai dengan hak yang sudah diatur dalam Undang-Undang. Terdapat banyak program pemerintah yang telah berhasil mengubah hidup seorang anak tetapi tidak secara efektif menyeluruh. Pemerintah memiliki tugas untuk melayani masyarakatnya dengan mendahulukan kepentingan-kepentingan publik, dan

⁷ Website resmi DPR. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.

<https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf>. (22/02/20) pukul 22.55

berfokus kepada masyarakat yang di kategorikan sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Permasalahan anak jalanan bukan sesuatu hal yang baru melainkan sebuah tantangan lama yang seharusnya dapat dihilangkan oleh pemerintah dan semua pihak. Banyaknya program yang telah dijalankan salah satunya mendapat predikat Kota Bandung sebagai Kota Layak Anak dengan mengedepankan kesejahteraan sosial bagi anak. Kasus yang terjadi cerminan bahwa kemiskinan masih menyelimuti masyarakat di masing-masing daerah.

Pemerintah melihat bahwa keberadaan anak jalanan masih banyak ditemukan di Kota Bandung. Pada masa pandemic covid-19 penjangkauan anak jalanan sulit dilakukan karena banyak balai maupun panti yang tutup sehingga rumah singgah di kantor Dinas Sosial Kota Bandung melebihi kapasitas.

Responsif yang dilakukan dengan adanya Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung yang merupakan Dinas Daerah menjalankan fungsinya dalam sektor pelayanan masyarakat dalam bidang kesejahteraan sosial. Terbentuknya Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung dimulai sejak tahun 2008, sebelumnya dinas tersebut berbentuk Kantor Sosial dan terjadi perubahan hingga saat ini. Perubahan tersebut karena suatu alasan terkait dengan permasalahan sosial atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang kuantitas jumlahnya butuh penanganan secara spesifik dan memerlukan suatu bantuan agar segera terselesaikan hingga tuntas. Dinas Sosial Kota Bandung mempunyai visi dan misi antara lain visi tersebut adalah

“kesejahteraan sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat menuju Bandung bebas Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS)” dan misi berupa:⁸

1. Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan partisipasi sosial dan masyarakat, terdapat peran aktif dari masyarakat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan
2. Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan rehabilitasi sosial guna memulihkan ketidakberdayaan masyarakat dalam melaksanakan fungsi sosialnya
3. Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan pelayanan sosial, yang mengandung pengertian optimalisasi pelayanan terhadap PMKS
4. Menyediakan data kesejahteraan sosial dan kemiskinan yang berkualitas serta terintegrasi

Rencana strategis yang telah ditetapkan dibentuk untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi PMKS, terutama pada tahun 2018 dibentuknya Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk membantu memberikan pelayanan awal kepada PMKS (anak jalanan). Terdapat banyak program yang merupakan perwujudan Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Bandung. Program tersebut antara lain Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, Program Pembinaan Anak Jalanan, Program Pembinaan Panti Asuhan dan Panti Jompo, Program Pembinaan Anak Terlantar, Program Pembinaan para

⁸ Web resmi Dinsosnangkis. <http://www.dinsosnangkis.bandung.go.id/sejarah-visi-misi> (23/02/20) pukul 14.52

Penyandang Cacat dan Eks-Trauma, Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Kehadiran Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung sangat memberikan pengaruh positif dan berdampak pada cara penanganan terhadap anak jalanan. Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung memiliki visi “Membersihkan jalanan Kota Bandung dari PMKS jalanan dan Mengupayakan PMKS jalanan untuk tidak kembali ke jalanan” dan adapun visinya sebagai berikut:

1. Penanganan awal
2. Mencegah PMKS jalanan kembali ke jalanan
3. Membantu melihat harapan yang positif
4. Fasilitasi bantuan praktis dan dukungan
5. Penelusuran dan pengembalian ke pihak keluarga⁹

Program Pembinaan Anak jalanan meliputi terselenggaranya pelatihan keterampilan, tersedianya database anak jalanan, kegiatan pengembangan bakat dan keterampilan, kegiatan pelayanan sosial bagi anak jalanan melalui pemberdayaan orang tua, kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan, pemberian bantuan sarana dan prasarana bagi Rumah Perlindungan Sosial Anak, Rumah Perlindungan Anak, Gedung Puskesmas yang memiliki tujuan dan sasaran untuk melayani PMKS berdasarkan basis data terpadu terkait kesehatan, Pendidikan, BPJS, bantuan sosial bagi anak jalanan. Gedung Puskesmas tersebut terletak di daerah Rancacili,

⁹ Profil Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung.

keluarahan Derwati, kecamatan Rancasari. Fungsi puskesmas melibatkan kegiatan rehabilitasi sosial, pemberdayaan, jaminan sosial dan perlindungan sosial. Program pembinaan yang dilakukan oleh UPT Dinas Sosial Kota Bandung terhambat oleh pandemic covid-19 yang membutuhkan banyak tenaga kerja dan pekerja sosial.

Efektivitas pemanfaatan diharapkan cukup besar bagi pusat rehabilitasi dan rumah singgah bagi klien. Program tersebut dibentuk untuk melayani PMKS salah satunya anak jalanan agar kebutuhan dasarnya terpenuhi (sandang, pangan, dan papan) sebelum diberikan ke system rujukan.

Adapun bidang di Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung meliputi bidang rehabilitasi sosial dan perlindungan pemberdayaan sosial bagi anak memiliki tugas dan fungsi untuk penyusunan rencana dan program, penyiapan bahan kebijakan lingkup rehabilitasi sosial anak, kebijakan operasional, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan fungsi lainnya bagi penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Keberhasilan program suatu Dinas tentu membutuhkan bantuan aparat dalam melancarkan sebuah program yang akan dilaksanakan. Dengan didirikannya rumah singgah anak belum menjamin bahwa anak tidak kembali ke jalanan. Berdasarkan keterangan hingga tahun 2019 peningkatan kuantitas anak jalanan tidak berubah secara signifikan, anak yang telah menerima pembinaan di rumah tersebut masih kembali ke jalanan. Pemerataan pembinaan dan pelatihan masih dirasakan belum secara efektif dalam penanganan anak jalanan, hal ini juga karena banyak anak yang pola pikir atau cara berpikirnya tidak berubah menjadi lebih baik. Penguatan

kerjasama dengan lembaga masyarakat, lembaga pemerintah daerah, lembaga swasta merupakan salah satu cara untuk meminimalisir fenomena anak jalanan.

Pemerintah menyadari bahwa penanganan bagi anak jalanan lebih dominan kepada anak-anak yang terdapat di panti sosial dan RPA tetapi untuk mereka yang masih melakukan aktivitas diluar belum mendapat jaminan dan perlindungan secara khusus. Selain anak-anak yang terdapat di RPA dan puskesmas, terdapat anak-anak dari luar daerah yang datang ke Kota Bandung untuk mencari pekerjaan informal di jalanan. Jika hal tersebut tidak segera untuk diatasi maka akan semakin meningkat anak yang berada di jalanan. Pelayanan tersebut akan diberikan kepada anak jalanan sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam bentuk bantuan stimulan yang disalurkan agar mereka mendapatkan pembinaan sehingga tidak balik ke jalanan. Pihak UPT Dinas Sosial Kota Bandung bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), TNI dan organisasi masyarakat dalam memberikan pembinaan.

Penelitian pada kasus pembinaan anak jalanan ini menggunakan manajemen kasus sebagai tolak ukur dalam tindakan penanganan kasus. Evaluasi program pembinaan melalui teori manajemen kasus yang melibatkan 7 tahap dalam memberikan pelayanan. Hal tersebut disebabkan karena terdapat permasalahan Sumber Daya Manusia yang kurang di UPT Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung menurut hasil observasi peneliti. Dalam manajemen kasus digunakan pendekatan manajemen publik yang termasuk dalam *public-private partnership*. Permasalahan ini termasuk ke dalam *collaborative governance*, dimana tidak hanya peran pemerintah saja tetapi peran pihak lain juga

masuk ke dalam penanganan anak jalanan.¹⁰ Perbedaan antara manajemen kasus sebelum dan sesudah pandemic dilihat dari persiapan pihak UPT untuk menyediakan perlengkapan kesehatan seperti mengadakan test rapid, bekerja sama dengan pihak puskesmas di Dinas Sosial. Dalam konteks manajemen publik, pendekatan manajemen kasus perlu dilakukan karena penanganan anak jalanan perlu penanganan khusus oleh masing-masing pekerja sehingga perlunya aktor lain yang bertindak, tidak hanya pemerintah saja.

Berdasarkan profil dan rencana strategis Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung menggunakan beberapa tahap yang berkaitan dengan manajemen kasus dalam memberikan pelayanan kepada klien. Melalui manajemen kasus diharapkan akan menyelesaikan permasalahan Sumber Daya Manusia dan meningkatkan jumlah pekerja sosial dalam melakukan pembinaan bagi anak jalanan. Melalui manajemen kasus terdapat penguatan kelembagaan dengan bekerjasama dan berkoordinasi melalui pihak terkait yang dibutuhkan seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), TNI, NGO dan organisasi masyarakat. Dengan penguatan kelembagaan dalam penanganan kasus tersebut, diharapkan hasil pengukuran keberhasilan program dan hambatan-hambatan yang terjadi melalui metode dalam manajemen kasus untuk memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh anak jalanan sebagai klien.

Pelaksanaan program yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung merupakan bentuk upaya

¹⁰ Chris Ansell & Alison Gash, 2008, *Collaborative Governance in Theory*. 2014 18(4), hal 1

untuk mensejahterakan anak jalanan dan sangat memberikan dampak yang positif bagi keberlangsungan hidup seorang anak sebagai klien. Terutama pada masa pandemic covid-19 yang mewajibkan masyarakat hidup bersih dan menghindari kerumunan. Berdasarkan data dan informasi yang tertera diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang **Pembinaan Anak Jalanan Pada Masa Pandemic covid-19 melalui Manajemen Kasus yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung.**

1.2 Rumusan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka terdapat pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pembinaan anak jalanan pada masa pandemic covid 19 melalui Manajemen Kasus yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung?

1.3 Identifikasi Masalah

Untuk mengetahui proses pembinaan anak jalanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Bandung dalam pelayanan terpadu bagi kesejahteraan sosial anak, maka peneliti akan mengidentifikasi masalah ke dalam beberapa pertanyaan, yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan identifikasi klien dalam pembinaan anak jalanan pada masa pandemic covid-19 melalui manajemen kasus yang dilaksanakan

oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung?

2. Bagaimana pelaksanaan assesmen klien dalam pembinaan anak jalanan pada masa pandemic covid-19 melalui manajemen kasus yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung?
3. Apakah rencana intervensi dalam pembinaan anak pada masa pandemic covid-19 jalanan melalui manajemen kasus yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung?
4. Bagaimana proses pencatatan dalam pembinaan anak jalanan pada masa pandemic covid-19 melalui manajemen kasus yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung?
5. Bagaimana tahap dukungan yang diberikan dalam pembinaan anak jalanan pada masa pandemic covid-19 melalui manajemen kasus yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung?
6. Bagaimana koordinasi dengan sumber daya yang dibutuhkan dalam pembinaan anak jalanan pada masa pandemic covid-19 melalui manajemen kasus yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung?

7. Bagaimana pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam pembinaan anak jalanan pada masa pandemic covid-19 melalui manajemen kasus yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pembinaan anak jalanan pada masa pandemic covid-19 melalui Manajemen Kasus yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung.

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan data dan informasi terkait dengan permasalahan anak jalanan di Kota Bandung dan dapat berguna untuk pengembangan bidang ilmu pengetahuan Administrasi Publik. Kemudian penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau rekomendasi dalam memberikan pelayanan kepada anak jalanan khususnya bagi Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung dan lembaga terkait dalam pengembangan sumber daya manusia pada tahun 2021 dan seterusnya.